

**PENGARUH PENGAWASAN¹, PEMAHAMAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN TERHADAP KINERJA UNIT SATUAN
KERJA PEMERINTAH DAERAH**
(Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku)

Askam Tuasikal
Universitas Pattimura Ambon

The purposes of this study are to investigate the relationship of internal and external controlling and local financial accounting system understanding; and how internal and external controlling and local financial accounting system understanding influence local financial management on partial and simultaneous ways; how internal and external controlling, local financial accounting system understanding, and local financial management partially and simultaneously influence local government. The methods of this study are descriptive and explanatory survey on 114 local government units of provinces, regency, and city at Moluccas. For collecting data, I used survey technique leading by questionnaires. The tool of analysis is path analysis. The conclusion of this research are; (1) There is negative relation between internal controlling and external controlling; there is no relation between external controlling and local financial accounting system understanding; and there is relation between internal controlling and local financial accounting system understanding; (2) Partially, only external controlling influences local financial management, and simultaneously, internal and external controlling, and local financial accounting system understanding influence local financial management; (3) Partially, internal controlling, local financial accounting system understanding, and local financial management influence local government performances. Simultaneously, internal and external controlling, local financial accounting system understanding, and local financial management influence local government performances

Keywords: *Internal and external controlling, local financial management, local government performance, local government entity unit.*

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma manajemen pemerintahan khususnya pemerintah daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah daerah karena perubahan tersebut turut mendorong perubahan manajemen keuangan daerah. Tuntutan tersebut memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Salah satu perubahan mendasar dalam manajemen

¹ Dalam artikel ini, penggunaan kata pengawasan, kontrol dan pengendalian digunakan secara bergantian dengan makna yang sama yaitu pengawasan, baik internal maupun eksternal.

keuangan daerah pasca reformasi keuangan daerah adalah perubahan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota, bukan pembukuan seperti yang dilaksanakan selama ini (Halim, 2002: 5).

Implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah belum bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan *good public governance*, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam, khususnya menyangkut pengawasan, pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah serta manajemen atau pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Dalam hal ini, unit satuan kerja dipandang memiliki peranan utama dalam operasional roda pemerintahan di daerah, karena unit satuan kerja merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban pemerintah daerah dan relatif lebih banyak melaksanakan tugas operasional pemerintahan dan lebih banyak mengkonsumsi sumber daya, yang tentunya harus diperuntukkan dan dipertanggungjawabkan pada kepentingan publik.

Suwardjono (2005:159) menegaskan bahwa akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomik untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomik negara. Salah satu tujuan ekonomik negara adalah alokasi sumber daya ekonomik secara efisien sehingga sumber daya ekonomik yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Hal senada dikemukakan Hay (1997:4) bahwa secara umum tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah untuk: (1) menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomik, politik, dan sosial, serta menampilkan akuntabilitas dan *stewardship*; (2) menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi.

Bila dicermati lebih jauh dalam pengelolaan keuangan daerah akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Newkirk (1986: 23) yang menegaskan bahwa dari sekian banyak problem yang ada pada pemerintah daerah salah satunya adalah tentang akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelola keuangan daerah pada masing-masing unit satuan kerja perlu dicermati guna menyelesaikan problem akuntansi dan penyajian informasi yang memadai. Hal senada dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:35) bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Lebih lanjut Mardiasmo (2002: 42) menyatakan terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak peduli atau mungkin tidak mengerti permasalahan sesungguhnya. Peterson (1994: 55) yang menegaskan *improving budgeting* di negara berkembang sulit dilakukan karena terdapat sejumlah keterbatasan dan kuatnya proses politik dalam alokasi sumber

daya. Demikian pula Newkirk (1986: 24) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan sistem informasi akuntansi keuangan sangat tergantung pada komitmen dan keterlibatan pegawai pemerintah daerah. Pernyataan ini menandakan sistem akuntansi keuangan sebagai alat kontrol perlu dipahami oleh personel atau pegawai unit satuan kerja pemerintah daerah yang berkomitmen, artinya keterlibatan pegawai yang memiliki pemahaman di bidang sistem akuntansi harus didukung oleh komitmen. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi keuangan. Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah, dari kacamata akuntansi, khususnya sistem akuntansi keuangan, akuntansi harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku Suwardjono (2005:159).

Motivasi penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Adanya regulasi yang memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah; (2) Dari sisi kelembagaan pengamatan terhadap organisasi sektor publik relatif lebih luas dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi komersial. (3) Secara umum organisasi pemerintah berada dalam pasar monopolistik atau quasi monopolistik (Miah, N.Z 1996:173); (4) Masih terdapat beberapa kesulitan dalam pengukuran kinerja sektor publik. Padahal pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang sangat penting. Lin et. al. (1993: 235) menegaskan bahwa pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah merupakan hal yang vital. Zudianto (2004:113) menyimpulkan beberapa kesulitan pengukuran kinerja pemerintah daerah, yaitu; indikator dampak dan manfaat tidak semuanya dapat diukur pada saat proyek berakhir.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertama, apakah terdapat hubungan antara pengawasan internal, dan eksternal, serta pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah. Kedua, bagaimana pengaruh pengawasan internal, pengawasan dan eksternal, serta pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, terhadap pengelolaan keuangan dan implikasinya terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah.

LANDADASAN TEORITIS

Pengawasan Internal

Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari *kesalahan*, melainkan mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara *optimal* Effendi (2005:4). Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen dan orang lain, dan didesain untuk memberikan penilaian yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi yang meliputi; efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang Boockholdt (1996;

456) dan Boynton (2001; 325). Sawyer et.al (2003: 58) menegaskan pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Terdapat lima elemen yang menentukan suatu sistem pengawasan atau pengendalian intern berjalan efektif atau tidak, yakni pemisahan tugas (*separation of duty*), sistem wewenang dan prosedur yang baik, praktik-praktik yang sehat, pegawai yang cakap, dan pemimpin yang punya komitmen terhadap sistem pengendalian. Kelima elemen tersebut mutlak diperlukan agar sebuah entitas dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan Yulianto (1999; 3).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah pengawasan internal merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dijalankan oleh eksekutif. Sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 pasal 41 (1) yaitu pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas, dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah atas nama kepala daerah. Demikian pula dalam keputusan Presiden nomor 74 tahun 2001 pasal (6), dinyatakan bahwa pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini alat yang dapat digunakan sebagai ukuran efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran. Freeman (2003; 71) bahwa pada instansi pemerintah anggaran digunakan sebagai alat pengawasan. Hal ini menandakan pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang tercermin dalam APBD. Cox et.al (1993) menegaskan bahwa sistem pengendalian intern setiap unit pemerintah sulit dilaksanakan karena adanya hubungan lingkungan operasi yang kompleks antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Awio (2001; 86) menegaskan bahwa pengendalian anggaran dapat dilakukan oleh dua kelompok, yaitu (1) Pengendalian yang dilakukan oleh legislatif dan (2) pengendalian yang dilakukan oleh eksekutif. Penegasan ini menandakan bahwa pengawasan atau penendalian yang dilakukan oleh legislatif merupakan pengawasan eksternal, dan pengawasan yang dilakukan oleh eksekutif merupakan pengawasan eksternal. Dari sudut sektor publik, Dunn (1999; 335) menegaskan bahwa dalam melakukan analisis terhadap kebijakan yang terkait dengan pengawasan minimal terdiri dari empat fungsi utama pengawasan, yaitu; (1) *explanation*, (2) akuntansi, (3) pemeriksaan, dan (4) *compliance*.

Salah satu objek yang membutuhkan pengawasan secara berkelanjutan adalah perilaku manusia yang membuat lingkungan selalu berubah. Sebagaimana ditegaskan oleh Siegel et. al (1989;75) bahwa fokus utama subsistem pengawasan keuangan adalah pada perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi, bukan pada mesin atau peralatan yang digunakan. Alasannya adalah dengan pengawasan keuangan yang baik dapat menekankan asumsi-asumsi penyimpangan perilaku. Karena tidak semua pengawasan yang didesain memperhatikan perilaku manusia. Dengan demikian dari sudut pengawasan, dapat dinyatakan bahwa pengawasan

merupakan pusat analisis kebijakan, ini berarti semua kebijakan yang dirumuskan dan dijalankan memiliki hubungan yang signifikan dengan pengawasan yang dibangun.

Ott et. al (2001; 311) menyatakan bahwa anggaran yang baik, termasuk proses dan teknik anggaran pada semua level pemerintahan merupakan suatu mekanisme pengendalian keuangan pada level pemerintahan pusat, dan dapat memberi pencerahan bagi semua pejabat dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol kinerja Pemerintah Daerah. Hal senada ditegaskan pula oleh Zimmerman (2000; 250) bahwa dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengendalian, anggaran merupakan suatu bagian dari sistem pengukuran kerja. Dengan demikian pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

Pengawasan Eksternal

Purdy (1993; 47) menegaskan bahwa pengawasan diperlukan untuk mengukur dan memprediksi tujuan serta peluang untuk melakukan intervensi terhadap aktivitas yang sesuai. Yulianto (1999;3) menegaskan bahwa pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi pemerintah (eksekutif). Secara normatif posisi pengawas eksternal adalah independen terhadap pemerintah. Artinya harus menyuarakan kepentingan publik yang terkait dengan pengelolaan atau alokasi anggaran publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah secara jelas ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 pasal (40) dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal (96) bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Pengawasan dimaksud bukan merupakan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD termasuk publik dan LSM merupakan pengawasan eksternal dan diarahkan pada pencapaian sasaran APBD. Freeman (2003; 71) menegaskan salah satu pihak yang berkompeten dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran adalah pihak legislatif.

Dari sisi teori keagenan, dapat dinyatakan bahwa dengan pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terhadap anggaran yang dilaksanakan oleh eksekutif merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi adanya asimetri informasi atau mengurangi ketidakpastian (Shield, 1998; 67). Karena legislatif dipandang sebagai pihak yang turut berperan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, maka pengawasan yang dimaksud adalah untuk mengetahui alokasi sumberdaya yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yulianto (1999;4) menegaskan bahwa secara garis besar penyebab penyimpangan pelaksanaan keuangan negara dalam bentuk korupsi dan kolusi maupun bentuk lainnya disebabkan oleh, yakni kurang berdayanya fungsi dan peranan lembaga pengawasan internal maupun eksternal dan format perpolitikan Indonesia yang kurang mendukung upaya pemberantasan korupsi dan kolusi. Lebih lanjut

Yulianto menegaskan bahwa ketidakberdayaan lembaga pengawasan disebabkan oleh; (1) komposisi aparat pengawasan, baik internal maupun eksternal, masih jauh dari memadai,(2), kedudukan akuntan pemerintah dalam struktur organisasi lembaga pengawasan intern relatif lemah, (3) kedudukan BPK terhadap Pemerintah tidak sepenuhnya independen, dan (4) kurangnya koordinasi antarlembaga pengawasan dalam melakukan tugas pemeriksaan.

Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam implementasi pengelola keuangan daerah dihapkan para pengelola perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat menyajikan laporan keuangan yang handal. Herbert et. al (1984: 3) menegaskan pada organisasi pemerintah terdapat dua orientasi atau kepentingan yang diperankan dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu orientasi laba dan bukan laba (*profit and nonprofit*). Oleh karena itu, personel yang terkait dengan penatausahaan keuangan daerah perlu memahami akuntansi. Mereka juga perlu memahami pelaporan akuntansi, memahami bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian. Hal senada ditegaskan oleh Collier (1997: 7) bahwa akuntansi memiliki implikasi terhadap hubungan antara pemegang kekuasaan dan lingkungan organisasi, serta sistem akuntansi manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempengaruhi strategi. Ini menandakan bahwa untuk memediasi hubungan antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lainnya yang ada di daerah diperlukan suatu media untuk mengkomunikasikan program-program pemerintah. Salah satu media yang dipandang relevan dalam mengkomunikasikan dan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi program-program pemerintah yang tercermin dalam APBD adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Argumen ini sejalan dengan pandangan Boockholdt, (1996: 455) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi menyediakan informasi bagi setiap individu yang ada di dalam dan di luar organisasi.

Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Hal ini sejalan dengan Purdy (1993: 47) yang menegaskan bahwa sebelum seseorang menggunakan data yang diperoleh, orang tersebut perlu memahami fungsi data tersebut, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sejalan dengan Purdy, Herbert et. al (1984: 4) yang menegaskan bahwa secara ekstrim penting bagi sebagian besar manajer (dinas, badan, kantor dan bagian) adalah memahami bagaimana informasi diperoleh, dianalisis, dan dilaporkan. Sebagian besar manajer juga harus memahami bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh organisasi lain dalam mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelola.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Terdapat empat dimensi penting yang tercermin dari pengertian tersebut, yaitu: (1) Adanya dimensi hak dan kewajiban; (2) Adanya dimensi tujuan dan perencanaan; (3) Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik; dan (4) Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi). Uraian tersebut menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Hal ini ditegaskan pula dalam PP Nomor 105 yang telah dirubah menjadi PP 58 Tahun 2006 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Edward (1992:13) menyatakan manajemen keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik jika pemerintah daerah dapat mendefinisikan secara jelas tujuan dari manajemen keuangan. Dari kacamata keuangan daerah Case (2002: 429) menyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana tindakan yang disiapkan untuk menggunakan sumber daya keuangan oleh pemerintah sesuai fungsi dan tujuan yang akan dicapai. Freeman et al, (2003:74) menegaskan bahwa desain sistem anggaran pemerintah harus *fit* dengan faktor-faktor yang ada. Kearns (1993; 40) menegaskan terdapat sejumlah faktor tertentu yang berpengaruh signifikan terhadap penentuan anggaran periodik (APBD), misalnya frekuensi sidang DPRD, budaya politik, pengeluaran, dan pendapatan.

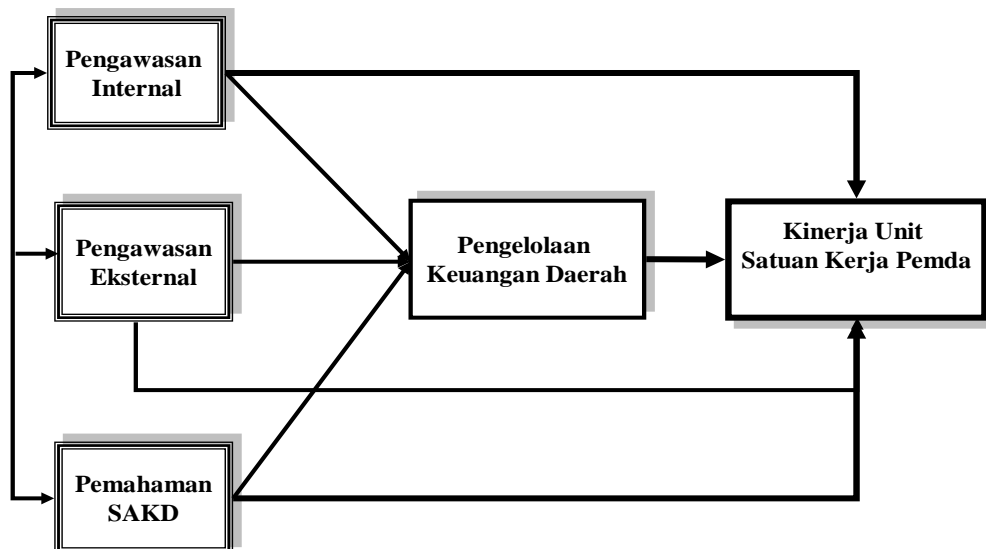
Uraian tersebut menunjukkan bahwa setiap pengeluaran pemerintah harus dipertimbangkan dampak lanjut dari pengeluaran tersebut, bukan pengeluaran yang didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian setiap pengeluaran pemerintah daerah harus diperhatikan fungsi dan tujuannya, serta mempertimbangkan kemampuan daerah.

Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah

Lin (1993; 17) menegaskan pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat vital karena peningkatan kualitas dan *comparability* informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang penting. Siegel et. al (1989:199) menegaskan tujuan utama evaluasi kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar-standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya, guna menghasilkan tindakan dan *outcome* yang diinginkan. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*). Dalam hal ini terdapat empat elemen kunci dari sistem pengukuran kinerja: (a) Perencanaan dan pencapaian tujuan; (b) Pengembangan ukuran yang relevan; (c) Pelaporan format dan hasil; dan (d) Penggunaan informasi. Laurensius dan Abdul Halim (2005:774) menegaskan pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pattison et. al (2002: 12) menegaskan terdapat hubungan antara kinerja dengan hasil akhir dari suatu keputusan yang dibuat. *Central European University* (2001; 1) menyatakan bahwa kinerja institusional memiliki berbagai dimensi dan tidak dapat diukur dari satu dimensi saja, karena kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Dalam kaitanya dengan kinerja pelayanan publik Thoha (1994:14) menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan, dan memberikan kepuasan kepada publik. Demikian pula Munir dkk (1995 :21) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan fungsi material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Kinerja pelayanan suatu organisasi merupakan salah satu aspek penting yang perlu dicermati untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuannya, dan untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan pelayanan yang dicapai (Kimisean dkk, 2004: 490).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dan sebelumnya, serta teori yang mendasari penelitian ini, maka dapat disajikan paradigma penelitian yang tampak pada gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan penjelasan-penjelasan yang dikemukakan di atas, maka rumuskan hipotesis-hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara pengawasan internal dan eksternal, dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Pengawasan internal dan eksternal, dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan.
3. Pengawasan internal dan eksternal, pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan

METODE PENELITIAN

Populasi dan prosedur pengumpulan data

Provinsi Maluku dengan ibu kota Ambon terdiri dari satu kota, dan delapan kabupaten. Dalam penelitian ini kabupaten/kota yang dijadikan objek pengamatan adalah kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, dan kota Ambon. Kabupaten lain tidak dimati karena saat penelitian ini berlangsung kabupaten-kabupaten tersebut baru dimekarkan sekitar satu-dua tahun. Populasi sasaran yang dipilih dalam penelitian ini adalah unit satuan kerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Maluku yaitu kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, dan kota Ambon, dengan populasi sasaran yang berjumlah 114 unit satuan kerja. Pemilihan populasi ini didasarkan pada pertimbangan berikut: Pertama, bahwa jumlah unit satuan kerja setiap pemerintah daerah tidak sama, artinya tergantung pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Kedua, dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih berperan adalah unit satuan kerja.

Responden akhir yang digunakan dalam analisis adalah 215 orang yang terdiri dari pejabat setingkat eselon II, III dan IV pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), anggota legislatif, dan masyarakat; meliputi LSM, Akademisi, dan, yang pernah terlibat langsung dalam penjangkaran aspirasi masyarakat (Asmara) dan Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrebang).

Operasionalisasi Variabel

Pengawasan Internal (X_1) merupakan bentuk pengawasan yang mencakup struktur dan seluruh metode dan prosedur yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta yang dimiliki perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu (Baridwan, 2004:47 dan Harahap 2004:134).

Pengawasan Eksternal (X_2) merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi pemerintah (eksekutif) (Yulianto, 1999:3; Baswir 2000:120 dan Harahap 2004 :150).

Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem yang bertujuan memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah bersangkutan Ulum (2004:243) dan Halim , 2002:1).

Pengelolaan Keuangan Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Y) adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan yang berada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut (Halim, 2002; 21 dan 2004:20).

Kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah (Z). Kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja pelayanan publik, yang meliputi; keadilan dan keamanan, responsif, dan produk layanan (Keban, 2004; Kurniawan, 2005). Ada tiga alasan penggunaan variable tersebut. Pertama, Fungsi negara adalah menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat, melakukan pelayanan baik produksi maupun distribusi yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan atas warga dari pemberi pelayanan yang kurang memuaskan (Wulan, 2005:760). Kedua, Keseimbangan antara terpenuhinya kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak dengan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang memadai perlu menjadi prioritas (M.Safar dkk, 2004:28). Ketiga, Kinerja pelayanan pemerintah daerah secara umum tercermin dalam proses dan keputusan pengalokasian dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (Mawardi dkk, 2002:2).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen yang digunakan, dan menunjukkan tingkat kevaliditasan atau kesahihan suatu instrumen, serta seberapa baik suatu konsep dapat didefinisikan oleh suatu ukuran (Hair *et al.*, 2000). Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Data yang dapat dilakukan analisis faktor bila *Kaiser's MSA* di atas 0,5 (Gozali,2005) dan item yang dimasukkan dalam analisis faktor adalah item-item yang memiliki *factor loading* di atas 0,40. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha* untuk menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan. Instrumen dikatakan *reliable* apabila memiliki *cronbach alpha* lebih dari 0.5 (Nunally, 1967). Hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas terlihat pada tabel 3.1. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua variabel yang akan diuji *valid* dan *reliable*. Ini berarti semua item pertanyaan dapat digunakan untuk melakukan penelitian ini.

Tabel 3.1
Pengujian Validitas dan Reliabilitas

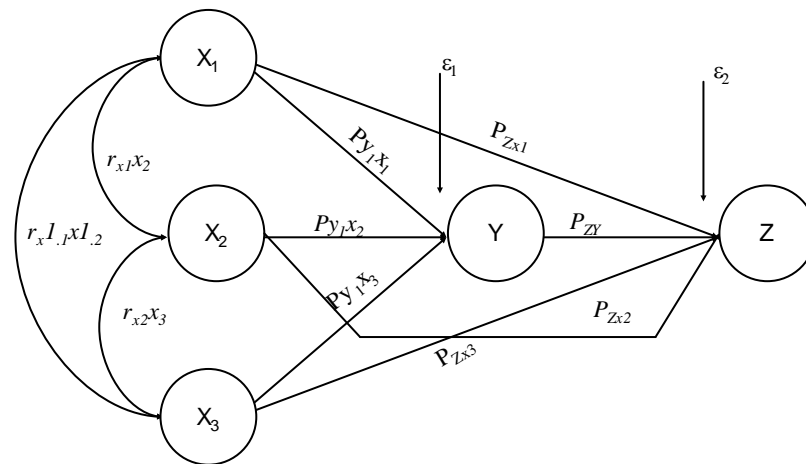
Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Kaiser's MSA</i>	<i>Factor Loading</i>
Pengawasan Internal (X ₁)I	0.666	0.572	0.594– 0.751
Pengawasan eksternal (X ₂)	0.775	0.563	0.452 – 0.988
Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan (X ₃)	0.665	0.545	0.639 – 0.976
Pengelolaan keuangan Daerah (Y)	0.781	0.563	0.639 – 0.997
Kinerja Unit Satuan Kerja (Z)	0.782	0.573	0.639 – 0.986

Sumber: Data diolah

Alat Analisis

Untuk menguji hipotesis pertama digunakan teknik analisis korelasi *person product moment*. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis kedua dan ketiga

digunakan analisis jalur (*path analysis*), yaitu suatu metode yang digunakan untuk menguji korelasi bivariat dalam mengestimasi suatu sistem hubungan persamaan struktural (Hair et.al, 2000: 583, dan Alrasyid, Harun. (1994). Alasan digunakan alat analisis ini adalah karena pola hubungan antara variabel dalam penelitian ini adalah bersifat kausalitas. Pengujian hipotesis kedua dan ketiga dapat dilihat dari koefesien jalur ($P_{Y|X_i}$; $i = 1,2,3$) dan ($P_{Z|X_i}$, $i = 1,2,3$ dan P_{ZY}) yang dapat digambarkan dalam hubungan struktural berikut:



Gambar 3.1
Gambar Hubungan Struktural Lengkap

Keterangan:

X_1 = Pengawasan Internal (PI)

X_2 = Pengawasan Eksternal (PE)

X_3 = Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Z = Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)

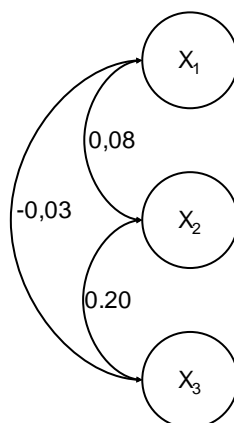
Y = Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (KPD)

ϵ = Epsilon

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil pengujian korelasi yang tampak pada lampiran A. Hubungan antara pengawasan internal dan eksternal, dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dapat digambarkan dalam hubungan sub struktur pertama sebagai berikut.



Gambar 4.1
Hubungan Struktural Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal, artinya pengawasan internal tidak ditunjang oleh pelaksanaan pengawasan eksternal. Hal ini menandakan bahwa, pengawasan eksternal yang merupakan salah satu media pengawasan yang cukup efektif tidak mampu menunjang pelaksanaan pengawasan internal. Secara teoritis, seharusnya kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang relatif kuat, karena dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah, intensitas pelaksanaan pengawasan internal merupakan pencerminan dari dorongan pengawasan eksternal. Sobandi (2004: 154) menegaskan pengawasan internal harus diimbangi dengan pengawasan eksternal dari instansi-instansi fungsional. Namun temuan empiris menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini disebabkan masih kuatnya intervensi pimpinan yang lebih tinggi dalam pelaksanaan pengawasan bahkan mungkin pola pengawasan yang dibangun pimpinan dalam bentuk pengawasan melekat kurang efektif.

Demikian pula Husen (2005: 203) menegaskan bahwa akuntabilitas publik, sesungguhnya terkait dengan bagaimana birokrasi publik (*agencies*) mewujudkan harapan-harapan publik (*principal*). Untuk dapat mewujudkannya, bukan saja tergantung pada kemampuan birokrasi dalam mendefinisikan dan mengelola harapan-harapan publik, tetapi tergantung pada kemampuan publik dalam melakukan pengawasan atas harapan-harapan yang telah didefinisikan, baik yang dilakukan oleh lembaga pengawasan resmi maupun oleh politisi dan masyarakat.

Faktor lain yang diduga turut mempengaruhi tidak adanya hubungan antara pengawasan internal dan eksternal adalah. Suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat dapat menjadi pilar penggerak pembangunan daerah dan tentunya dapat melakukan kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah melalui mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan dengan cara yang santun dan elegan. Estiningsih (2005:21) yang menegaskan bahwa tingginya budaya dalam suatu masyarakat sangat menentukan mekanisme kontrol terhadap birokrat, khususnya aparatur dalam melakukan tugasnya.

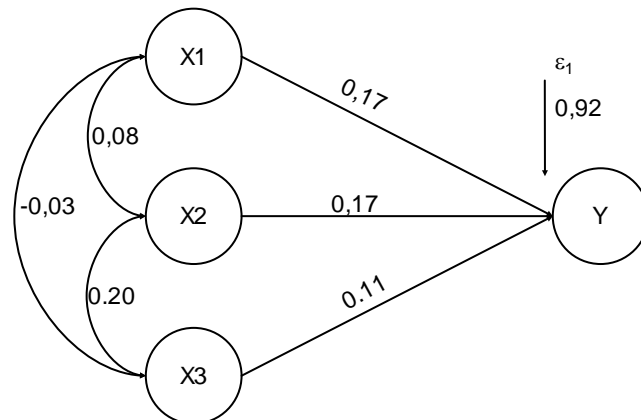
Selanjutnya terdapat hubungan antara pengawasan eksternal dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai koefisien korelasi 0,20, dan secara statistik tidak signifikansi pada level 0,05. Dari sudut teoritis seharusnya kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat, namun temuan penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor misalnya, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan manajemen keuangan dan akuntansi keuangan. Karena pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan publik lebih berkaitan dengan aspek non teknis terutama menyangkut kebijakan eksekutif dalam pengalokasian sumber daya. Argumentasi ini sejalan dengan pandangan Husen (2005: 231) yang menyatakan pengawasan yang dilakukan oleh dewan hanya dalam bentuk pengecekan (*expost*) yang hanya berkaitan dengan hak-hak konstitusi. Demikian pula Yulianto (1999:4) menegaskan bahwa ketidakberdayaan lembaga pengawasan disebabkan oleh; (1) komposisi aparat pengawasan, baik internal maupun eksternal, masih jauh dari memadai, (2), kedudukan akuntan pemerintah dalam struktur organisasi lembaga pengawasan intern relatif lemah, (3) kedudukan BPK terhadap Pemerintah tidak sepenuhnya independen, dan (4) kurangnya koordinasi antar lembaga pengawasan dalam melakukan tugas pemeriksaan.

Temuan lainnya menunjukkan terdapat hubungan negatif antara pengawasan internal dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai koefisien korelasi -0,03 pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,80$. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah tidak ditunjang oleh pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah. Demikian pula peningkatan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah yang tercermin dalam pencatatan dan penyajian pelaporan keuangan pemerintah daerah belum mampu menunjang penegakan pengawasan internal. Secara teoritis kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang relatif kuat, namun temuan penelitian menunjukkan hasil yang berbeda.

Pengujian Hipotesis Kedua

Pada gambar 4.2. ditunjukkan hubungan struktural dan pengaruh antara variabel. Berdasarkan hasil pengujian statistik yang tampak pada lampiran B, dan hasil perhitungan yang tampak pada Tabel 4.1 lampiran D, Secara visual hubungan

struktural antara variabel dapat gambarkan dalam analisis jalur (*path analysis*) berikut.



Gambar 4.2
Hubungan Struktural Pengujian Hipotesis Kedua

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan unit satuan kerja, sebesar 0,174 atau $(0,174 \times 0,174) \times 100\% = 3,03\%$, signifikan pada level 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan unit satuan kerja, meskipun pengaruh tersebut relatif kecil. Dapat dinyatakan pula bahwa variabel pengawasan internal hanya dapat menjelaskan variabel pengelolaan keuangan unit satuan kerja sebesar 3,03%. Selebihnya, 93,07% dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya nilai koefisien jalur 0,174 menunjukkan bahwa bila pengawasan internal meningkat 1 persen, maka pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah meningkat 0,174 persen.

Pengaruh pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah yang relatif rendah menunjukkan bahwa implementasi pengawasan internal pada setiap unit satuan kerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Maluku kurang menunjang implementasi pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah. Secara teoritis semestinya pengawasan internal memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah. Husen (2005: 107), menegaskan bahwa pengawasan memiliki hubungan yang cukup kuat dengan pengelolaan keuangan unit satuan kerja, misalnya perencanaan. Artinya dengan adanya perencanaan pengelolaan keuangan yang baik maka pengawasan juga dapat dilaksanakan dengan baik. Namun temuan empiris menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, misalnya moral pegawai atau aparatur pengelola keuangan daerah. Argumen ini sejalan dengan Osborne (2001: 23) yang menegaskan bahwa kegagalan mengubah perilaku pegawai negeri akan menghambat perubahan birokrasi pemerintah. Temuan ini konsisten dengan pandangan Baswir (2004:172) yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga pengawasan fungsional dalam lingkungan internal birokrasi, pada umumnya gagal

mengembang fungsinya sebagaimana diharapkan. Ini berarti peranan lembaga-lembaga pengawasan dilingkungan pemerintahan masih perlu dibenahi agar bisa berfungsi dengan baik. Pandangan ini sejalan dengan Yulianto (1999:4) menegaskan bahwa ketidakberdayaan lembaga pengawasan disebabkan oleh; (1) komposisi aparat pengawasan, baik internal maupun eksternal, masih jauh dari memadai,(2), kedudukan akuntan pemerintah dalam struktur organisasi lembaga pengawasan intern relatif lemah, (3) kedudukan BPK terhadap Pemerintah tidak sepenuhnya independen, dan (4) kurangnya koordinasi antarlembaga pengawasan dalam melakukan tugas pemeriksaan.

Selanjutnya terdapat pengaruh langsung pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah 0,169 atau $(0,169 \times 0,169) \times 100\% = 2,86\%$, dan secara statistik signifikan pada level 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengawasan eksternal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah. Dalam pernyataan lain, dapat dikatakan bahwa implementasi pengawasan eksternal dapat menunjang pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah sebesar 2,86%. Selebihnya, 97,14% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Menurut penulis pengaruh yang lemah ini disebabkan oleh bentuk pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pihak eksternal yang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Yulianto, 1999:3; Baswir 2000:120 dan Harahap 2004 :150) menegaskan bahwa pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi pemerintah (eksekutif). Yulianto, 1999:3; Baswir 2000:120 dan Harahap 2004 :150

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan eksternal berpengaruh terhadap implementasi pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah. Artinya makin intensif implementasi pengawasan eksternal yang dilakukan oleh dewan dan publik, makin baik pengelolaan keuangan unit satuan kerja. Meskipun demikian pengaruh pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah sangat lemah. Hal ini terjadi karena pengawasan eksternal yang dijalankan selama ini, baik oleh dewan maupun publik kurang menyentuh substansi pengawasan. Artinya pengawasan yang dilakukan masih bersifat parsial. Hal ini menandakan dewan dan masyarakat atau publik kurang berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Temuan ini konsisten dengan pendapat Freeman, (2003: 71) dan Ott el al, (2001:311) yang menyatakan bahwa pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk mengawasi kebijakan dan alokasi sumber daya.

Temuan lain menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,112 atau $(0,112 \times 0,112) \times 100\% = 1,26\%$, secara statistik tidak signifikan pada level 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman eksekutif tentang sistem akuntansi keuangan daerah belum menunjukkan makna yang berarti dalam menunjang pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah.

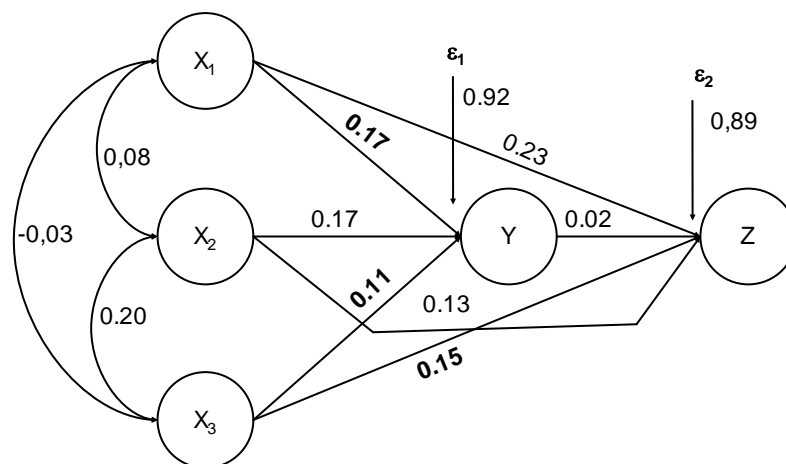
Secara teoritis seharusnya dalam implementasi anggaran berbasis kinerja pemahaman eksekutif mengenai sistem akuntansi daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah. Namun temuan penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi seperti ini misalnya budaya dan kemampuan sumber daya atau pegawai tertentu yang belum terbiasa dengan pola pengelolaan keuangan daerah yang baru, terutama yang terkait dengan akuntansi anggaran. Temuan ini tidak konsisten dengan Herbert et al, (1984 dan Collier, 1997). Keduanya menyatakan bahwa pemahaman mengenai sistem akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, karena pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pencatatan dan penyajian pelaporan keuangan.

Secara simultan pengaruh pengawasan internal dan eksternal dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,08%, signifikan pada level 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa secara simultan pengawasan internal dan eksternal dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dapat menjelaskan pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah sebesar 8,28% dan sisanya 91,72% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengawasan internal dan eksternal dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah. Menurut dugaan penulis selain faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia, moral dan motivasi pegawai, budaya, masih ada faktor lain yang turut berpengaruh, seperti dukungan infrastruktur dan teknologi informasi, restrukturisasi organisasi sebagai akibat perubahan peraturan..

Pengujian Hipotesis Ketiga

Pada gambar 4.3 ditunjukkan hubungan struktural hasil pengujian hipotesis



Gambar 4.3
Hubungan Struktur Pengujian Hipotesis Ketiga

Dari hasil hasil pengujian statistik yang tampak pada lampiran C dan perghitungan yang tampak pada tabel 4.3 lampiran D menunjukkan bahwa pengaruh langsung pengawasan internal terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah adalah 0,232 atau $(0,232 \times 0,232) \times 100\% = 5,38\%$, dan signifikan pada level 0,05. Dapat dinyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Dalam pernyataan lain dapat dinyatakan bahwa pengawasan internal dapat menjelaskan kinerja unit satuan kerja sebesar 5,38%. Sisanya sebesar 94,62% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. Selanjutnya koefisien jalur 0,232% menunjukkan bahwa, jika pengawasan internal naik 1 persen, maka kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah naik 0,232%..

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan internal dapat mendorong peningkatan kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal yang ada pada masing-masing unit satuan kerja pemerintah daerah di provinsi Maluku telah terlaksana dengan baik, meskipun dukungan yang diberikan belum maksimal. Temuan ini konsisten dengan pandangan Boockholdt (1996); Boynton (2001) dan Awio et.al, (2001) yang menyatakan bahwa pengawasan internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan orang lain, dan didesain untuk memberikan penilaian yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung pengawasan eksternal terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah adalah 0,127 atau $(0,127 \times 0,127) \times 100\% = 1,62\%$, dan tidak signifikan pada level 0,05. Ini berarti pengawasan eksternal tidak berpengaruh terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan eksternal belum mampu mendorong peningkatan kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Secara teoritis seharusnya pengawasan eksternal memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah daerah, namun temuan empiris menunjukkan hal yang berbeda. Hal

ini disebabkan oleh mekanisme pengawasan yang dibangun oleh dewan dan masyarakat belum menyentuh substansi pengawasan. Dapat dinyatakan pula bahwa dalam melakukan pengawasannya, anggota dewan lebih cenderung mengarah pada kepentingan partai politik yang merupakan induk partainya. Argumen ini sejalan dengan pandangan Estiningsih (2005: 52) yang menyatakan bahwa dalam praktik sering ditemukan adanya anggota dewan yang kurang kritis terhadap bidang tertentu karena takut bertentangan dengan eksekutif atau kebijakan partainya. Namun tidak konsisten dengan Indriani (2002) ; Sopanah dan Mardiasmo (2003); yang menyimpulkan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota Dewan.

Di samping itu, pengawasan eksternal yang dilakukan selama ini lebih bernuansa politik. Sebagaimana ditegaskan Baswir (2004: 173) bahwa hampir semua persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan memiliki dimensi politik, sehingga dominannya peranan pertimbangan politik dalam menindaklanjuti temuan penyimpangan menjadi sulit dielakkan. Hal yang sama terjadi pada mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh LSM. Argumen ini sejalan dengan pandangan Eko (2005:169) yang menegaskan bahwa terdapat sejumlah LSM tertentu yang dalam melakukan pengawasan, orientasi mereka lebih bersifat pragmatis, yakni mencari nafkah.

Selanjutnya terdapat pengaruh langsung pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah adalah $0,152$ atau $(0,152 \times 0,152) \times 100\% = 2,31\%$, dan tidak signifikan pada level $0,05$. Temuan ini menandakan bahwa pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah tidak dapat menunjang peningkatan kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Secara teoritis seharusnya pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah, namun temuan empiris menunjukkan hasil yang berbeda. Temuan penelitian tidak mendukung pandangan (Zimmerman, 2000), yang menegaskan bahwa dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan pelayanan publik, pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang memadai di bidang keuangan daerah.

Demikian pula terdapat pengaruh langsung pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah (kinerja pelayanan publik) adalah $0,021$ atau $(0,021 \times 0,021) \times 100\% = 0,04\%$, dan signifikan pada level $0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak dapat mendukung peningkatan kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Secara teoritis seharusnya pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap unit satuan kerja pemerintah daerah, namun temuan empiris menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini terjadi karena dalam pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah cenderung bergeser dari rencana anggaran satuan kerja (RASK) yang telah disusun. Alasan ini mengacu pada hasil wawancara dengan beberapa responden. Misalnya dari Bappeda diperoleh kesimpulan bahwa meskipun program dan dana

yang telah mereka susun dan usulkan berdasarkan pada kebutuhan masing-masing unit satuan kerja, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan masing-masing unit satuan kerja karena ada intervensi pimpinan yang lebih tinggi.

Secara simultan pengawasan internal dan eksternal, pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah dengan koefisien determinasi 0,11, dan signifikan pada level 0,05. Temuan ini menandakan bahwa secara simultan ketiga variabel ini dapat menjelaskan kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah sebesar 11% dan sisanya 89% dijelaskan oleh variabel di luar yang diteliti. Secara statistik pengaruh tersebut sangat lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa sejumlah variabel yang diteliti belum mampu memberikan dukungan yang memadai dalam meningkatkan kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Demikian pula pengelolaan keuangan daerah kurang memperhatikan kepentingan publik karena adanya intervensi pimpinan dan tarik ulur antara eksekutif dan legislatif yang begitu kuat.

Selanjutnya meskipun pengawasan eksternal dilakukan secara intensif tetapi karena bentuk pengawasan tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan implementasi pengelolaan keuangan daerah, maka bentuk pengawasan tersebut tidak efektif. Ketidakefektifan tersebut berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik setiap unit satuan kerja masing-masing pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena pengawasan internal dan eksternal di sektor publik memiliki keunikan dibandingkan dengan sektor swasta karena penyusunan anggaran memerlukan konfirmasi dengan publik dan DPRD sebagai bagian dari fungsi akuntabilitas pengelolaan dana publik yang lebih bernuansa politik. Pandangan ini sejalan dengan Mardiasmo (2002) yang menegaskan penganggaran sektor swasta relatif kecil nuansa politiknya. Adanya nuansa politik yang begitu kental dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah menyebabkan hak-hak publik yang terkait dengan pelayanan, misalnya pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi kurang mendapat perhatian.

Demikian pula masih rendahnya pemahaman eksekutif terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, juga terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Rendahnya pemahaman eksekutif tentang sistem akuntansi keuangan daerah dapat mempengaruhi manajemen keuangan daerah terutama yang terkait dengan akuntansi anggaran dan tentunya berpengaruh pula terhadap kinerja pelayanan publik unit satuan kerja masing-masing pemerintah daerah. Penjelasan ini sejalan dengan Collier (1997: 167) yang menegaskan bahwa akuntansi memiliki implikasi terhadap hubungan antara pemegang kekuasaan dan lingkungan organisasi serta sistem akuntansi manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempengaruhi strategi. Kemungkinan lain yang juga menyebabkan rendahnya kinerja pelayanan publik pemerintah daerah adalah sistem politik, karena sistem politik cenderung mempengaruhi pengambil kebijakan atau pelayan publik untuk mementingkan dirinya sendiri. Nur (2004:223) menegaskan masih banyak kesulitan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah karena pemahaman pelaksana yang kurang memadai, dan inkonsistensi DPRD dalam melakukan evaluasi pada tahap ratifikasi RAPBD, dan pada tahap pengawasan.

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa secara parsial tidak terdapat hubungan antara pengawasan internal dan eksternal. Demikian pula tidak terdapat hubungan antara pengawasan internal dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah. Namun terdapat hubungan antara pengawasan eksternal dengan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah.

Secara parsial pengawasan internal dan eksternal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan unit satuan kerja pemerintah daerah. Di sisi lain pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya secara simultan pengawasan internal dan eksternal dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Secara parsial pengawasan internal dan eksternal serta pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Namun secara simultan pengawasan internal dan eksternal, dan pemahaman mengenai sistem akuntansi, serta pengelolaan keuangan berpengaruh relatif rendah terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah.

SARAN

Pimpinan unit satuan kerja dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah senantiasa lebih memperhatikan pemenuhan kepentingan publik dengan lebih meningkatkan intensitas pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah, Untuk meningkatkan pemahaman personel di bidang pengelolaan keuangan daerah, perlu lebih diintensifkan pelatihan di bidang manajemen keuangan dan akuntansi keuangan daerah secara berkelanjutan dan untuk mempermudah proses penyajian pelaporan keuangan, dan dalam jangka pendek disarankan menggunakan tenaga ahli atau konsultan di bidang akuntansi dan manajemen keuangan daerah. Demikian pula perlu dilaksanakan pembinaan moral dan membenahi budaya kerja setiap unit satuan kerja pemerintah daerah secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Alrasyid, Harun. 1994. *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung
- Awio, Godwin. 2001. Decentralization and Budgeting: The Uganda Health Sector Experience. *The International Journal of Public Sector Management*, Vol 14. No.1.
- Baridwan, Zaki. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Baswir, Revisound. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- _____. 2004. *DRAMA EKONOMI INDONESIA; Belajar Dari Kegagalan Ekonomi Orde Baru*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Boockholdt, L.J. 1996. *Accounting Information Systems-Transaction Processing and Controls*. Fourth Edition. Irwin
- Boynton, C. William and Walter G. Kell. 2001. *Modern Auditing*. 7th Edition, John Wiley & Sons, Inc.
- Central European University/Tocqueville Research Center. 2001. *Dimensions of Local Government Performance*.
- Case, E. Fred. 2002. The Budget as a Measure of the Federal Urban Housing Programs. *The Journal of Finance*. Volume 6.
- Collier, M. Paull. 1997. *The Power of Accounting; A Field Study of Local Financial Management in a Police Force*. Aston Business School Research Institute.
- Cox, T. Clifford, and Henry Wichmann, Jr. 1993. The Perceived Quality of Internal Control Systems and Reports for State and Local Government, *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. Vol 12. No.2. Fall.
- Edwar, J. Mazur. 1992. The Vision for Improving Federal Financial Management, *The Government Accountants Journal*. Vol. 41. No.3. fall.
- Effendi, Arief Muh. 2006. Mekanisme Pengawasan Keuangan negara <http://muhariefeffendi.wordpress.com>
- Eko, Sutoro. 2005. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat. Dalam R. Widodo Tripuro dan Suparal (editor). *Pembaharuan Otonomi Daerah*. Yogyakarta. APMD Press.
- Estiningsih, Muji. 2005. *Fungsi Pengawasan DPRD*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Freeman, J. Robert and Craig D. Shoulders. 2004. *Governmental and nonprofit Accounting*. Pearson Education. Inc. New Jersey
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi 3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Granof, H. Michael. 2001. *Government and Not-for-Profit Accounting*. Second Edition. John Wiley & Sons. Inc.
- Hair, F. Joseph, Rolph E. Anderson, Ronald L. Tatham dan William C. Blac. 2000. *Multivariate Data Analysis*. Fiveth Edition. Prentice-Hall International. Inc.

- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah; Seri Bunga Ranpai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Pustaka Quantum. Jakarta
- _____. 2005. *Teori Akuntansi Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hay E. Leon, and John H. Engstrom. 1997. *Essetials of Accounting For Governmental and Not-for-Profit Organizations*. Irwin. Inc.
- Herbert, Leo. Larry N. Killough. and Alan Walter. 1984. *Givermental Accounting and Control*. Cole Publishing Company.
- H. Mawardi, Syaikhu Usman, Vita B, Racheal D, dan Nina Toyama.2002. *Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah Atas Kinerja Pelayanan Publik*.www.semeru.or.id.
- Husen, La Ode.2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.Cetakan pertama.Bandung. Utomo.
- Kimsean, Yin, Yermias dan Subarsono.2004. *Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Yogyakarta*. SOSIOSAINS.17(3). Yogyakarta.
- Keban, Yermias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*.Gava Media. Yogyakarta.
- Kearns, S. Paula. 1993.*The Determinants of State Budget Periodicity: An Emperical Analysis.Public Budgeting & Finance*.Vol.13 No.1.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan PUBLIK*. Pembaruan. Yogyakarta.
- Laurensius, Ferry. S dan Abdul Halim Pengaruh.2005. *Faktor-Faktor Rasional, Politik dan Kultur Organisasi terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemrintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 8, September. Solo.
- Lin, Wenshan, and K. K. Raman. 1998. The housing value-relevance of governmental accounting information. *Journal of Accounting and Public Policy* 17.
- Lin, Jun.Z. 1993. Harmonization of Financial Reporting by Governments in Canada, *Financial Accountability & Management*. 9 (1). February.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi dan Mardiasmo. 2004. *Local Government Performance Measurement In The Era Of Local Autonomy: The Case Of Sleman Regency Yogyakarta*. SOSIOSAINS. 17 (1). Hal 117-133.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- _____. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Miah, Z. N dan L. Mia. 1996. Decentralization, Accounting Controls and Performance of Government Organizations: A New Zeland

- Emperical Study. *Financial Accountability & Management*. 12 (3), August.
- Munir, Has. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Nazir, Mohammad. 2004. *METODE PENELITIAN*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Newkirk, E. Thomas. 1986. Improving Financial Information Systems in Local Government. *Management Accounting*.
- Nur, Nunuy Afiah. 2004. *Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, serta Kualitas Informasi Keuangan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Ott, Katarina and Anto Bajo. 2001. *Local Government Budgeting in Croatia On year after*. Institute of Public Finance. Zagreb.
- Osborne, David and Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government; How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley Publishing Company. Inc.
- Pattison, Scott and Nick Samuels. 2002. Trends and Issues in Performance-Based Budgeting. *The Journal of State Government*.
- Peterson, B. Stephen. 1994. Budgeting in Kenya: Praktice and Prescription, *Public Budgeting & Finance*. Vol.14, N0.3, Fall.
- Purdy, E. Derek. 1993. Accounting, Controls, Change and The Perceptions of managers: A Longitudinal Study of Ward Units in A Teaching Hospital. *Financial Accountability & Management*, 9 (1), February.
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang PEDOMAN Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2002 Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
- _____. 2004. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- M. Safar Nasir, Suharyani, Fathur R, Dewi A dan Khusnul H. 2004. *Prosiding SEMINAR NASIONAL PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH*. Yogyakarta. UAD Press.

- Nunally. 1967. *Psychometric Theory*. New York : McGraw-Hill.
- Seiabudi, Hendry Y. dan Iwan Triyuwono. 2002. *Akuntansi Ekuitas, Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Salemba Empat. Jakarta.
- Shield, J. F dan M.D. Shield. 1998. Antecedents of Participative Budgeting, *Accounting Organization and Society*. Vol.23 No.1.
- Siegel, Gary. Helene R. Marconi, and Ivana A. Setiaone. 1989. *Behavioral Accounting*. South-Western Publishing Co.
- Sophana, dan Mardiasmo.2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Suwardjono.2001. Akuntansi Pengantar: Perekayasaan Akuntansi Keuangan. BPFE. Yogyakarta.
- _____.2005. Teori Akuntansi Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta
- Thoha, Miftah. 2002. *Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jilid II. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- _____. 2004. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ulum, Ihyaul MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar*.Universitas Mauhammadiyah. Malang.
- Wulan, Iyhig dan Indra Bastian.2005. Rancangan Sistem Kesejahteraan Sosial (*social security system*) di Indonesia dalam Perspektif Akuntansi (Studi Empiris Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Simposium Nasional Akuntansi 8, September. Solo.
- Yulianto, Eko, 1999. Korupsi, Pengawasan Keuangan Negara dan Format Politik <http://ekojulianto.tripod.com>
- Zimmerman, Jerold. 1982. *Research on Positive Theories of Financial Accounting*. The University of Alabama. November.
- _____. 2000, *Accounting for Decision Making and Control*. Third Edition. McGraw-Hill Higher Companies.
- Zudianto, Herry. 2004. Permasalahan Implementasi Indikator Kinerja di Kota Yogyakarta. M. Safar dkk (Penyunting). Pengekuran Kinerja Pemerintah Daerah. UAD Press. Yogyakarta.

Lampiran A.

Tabel 4.1
Matriks Korelasi
Correlations

		PI	PE	PSAKD	PKD	KINERJA
PI	Pearson Correlation	.24	.084	-.034	-.439	-.199
	Sig. (2-tailed)	.	.320	.002	.000	.034
	N	114	114	114	114	114
PE	Pearson Correlation	.084	1.000	.234	-.372	-.172
	Sig. (2-tailed)	.320	.	.013	.000	.068
	N	114	114	114	114	114
PSAKD	Pearson Correlation	-.034	.234	1.000	-.701	-.402
	Sig. (2-tailed)	.002	.013	.	.000	.000
	N	114	114	114	114	114
PKD	Pearson Correlation	-.439	-.372	-.701	1.000	.424
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.000
	N	114	114	114	114	114
KINERJA	Pearson Correlation	-.199	-.172	-.402	.424	1.000
	Sig. (2-tailed)	.034	.068	.000	.000	.
	N	114	114	114	114	114

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran B

Tabel.4.2. Ringkasan Perhitungan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel X₁,X₂ dan X₃ Terhadap Y.

1. Pengaruh langsung X ₁ terhadap Y	$(0,174 \times 0,174) \times 100\% = 3,0276 \%$
2. Pengaruh langsung X ₂ terhadap Y	$(0,169 \times 0,169) \times 100\% = 2,8561 \%$
3. Pengaruh langsung X ₃ terhadap Y	$(0,112 \times 0,112) \times 100\% = 1,2544 \%$
Jumlah Pengaruh Langsung	7,1381 %
4. Pengaruh X ₁ dan X ₂ terhadap Y	$(0,174 \times 0,078 \times 0,169) \times 2 \times 100 = 0,4587 \%$
5. Pengaruh X ₂ dan X ₃ terhadap Y	$(0,169 \times 0,183 \times 0,112) \times 2 \times 100 = 0,6928 \%$
6. Pengaruh X ₁ dan X ₃ terhadap Y	$(0,174 \times (-0,025) \times 0,112) \times 2 \times 100 = -0,0974\%$
Jumlah pengaruh langsung dan bersama-sama X₁,X₂, dan X₃ terhadap Y	8,2799 %

Sumber: Diolah dari hasil pengujian statistik.

Tabel 4.3. Ringkasan Pengaruh Variabel X₁, X₂, X₃ dan Y Terhadap Z

1. PENGARUH LANGSUNG X ₁ TERHADAP Z (0,232 X 0,232) X 100% = 5,3824 %	
2. PENGARUH LANGSUNG X ₂ TERHADAP Z (0,127 X 0,127) X 100% = 1,6129 %	
3. PENGARUH LANGSUNG X ₃ TERHADAP Z (0,152 X 0,152) X 100% = 2,3104 %	
4. PENGARUH LANGSUNG Y TERHADAP Z (0,021 X 0,021) X 100 % = 0,0441 %	
Jumlah Pengaruh Langsung	9,3498 %
5. Pengaruh Y terhadap Z melalui X ₁ (0,021 x 0,174 x 0,233) x 2 x 100%	0,1703 %
6. Pengaruh Y terhadap Z melalui X ₁ (0,021 x 0,169 x 0,127) x 2 x 100%	0,0901 %
7. Pengaruh Y terhadap Z melalui X ₃ (0,021 x 0,112 x 0,152) x 2 x 100%	0,0715 %
8. Pengaruh Y terhadap Z melalui X ₁ dan X ₂ (0,021 x 0,174 x 0,078 x 0,127) x 2 x 100%	0,0072 %
9. Pengaruh Y terhadap Z melalui X ₂ dan X ₃ (0,021 x 0,174 x (- 0,025) x 0,127) x 2 x 100%	-0,0028%
10. Pengaruh Y terhadap Z melalui X ₂ dan Y (0,021 x 0,169 x 0,183 x 0,152) x 2 x 100%	0,0197 %
11. Pengaruh X ₁ terhadap Z melalui X ₂ dan Y (0,232 x 0,078 x 0,127 x 0,021) x 2 x 100%	0,0097 %
12. Pengaruh X ₁ terhadap Z melalui X ₃ dan Y (0,232 x (-0,025) x 0,152 x 0,021) x 2 x 100%	-0,0037%
Jumlah pengaruh langsung dan bersama-sama X₁,X₂,X₃ dan Y terhadap Z	9,7119 %

Sumber: Diolah dari hasil pengujian statistik